PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANGTAHUN 2020

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa RKT dapat menjembatani antara RENSTRA dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat indikator kinerja sasaran, kelompok indikator kinerja kegiatan beserta masing-masing rencana capaiannya. Penyusunan RKT ini diharapkan pula dapat lebih memberikan arah yang jelas bagi "Pencapaian Target Dalam Kurun Waktu 1 Tahun yaitu dimulai dari bulan Januari 2020 s/d Desember 2020".

Selanjutnya RKT ini akan dijadikan pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas seluruh tugas pelaksanaan dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

RKT Tahun 2020 ini merupakan komitmen kinerja bersama bagi pimpinan dan aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, oleh karena itu harus dijadikan acuan dalam implementasi program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan RKT ini, untuk itu saran yang konstruktif sangat diperlukan guna penyempurnaan materi Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang di masa mendatang.

Sintang, Pebruari 2020

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

Ir. BERNHAD SARAGIH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650201 199403 1 009

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Isi

			Hal
KATA PENGANTAR			**i**
DAFTAR ISI			**iii**
DAFTAR TABEL			**iv**
BABI	**:**	**PENDAHULUAN**	
		A. Umum	**1**
		B. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang	**4**
		C. Hal-Hal LainYangBerpengaruh	**9**
BABII	**:**	**RENCANASTRATEGIS**	
		A. Telaahan Visi, Misi dan Program KerjaKepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah	**16**
		B. TujuandanSasaran	**23**
		C. Cara Mencapai TujuandanSasaran	**26**
BABIII	**:**	**RENCANA KINERJA TAHUN2020**	
		A. Sasaran, Program dan KegiatanTahun2020	**29**
		B. Kinerja KegiatanTahun2020	**32**
		C. Sistem Pengumpulan Data KinerjaTahun2020	**33**
		D. PengukuranCapaianKinerja	**33**
BABIV	**:**	**PENUTUP**	
		A. Kesimpulan	**38**
		B. Upaya YangAkanDilakukan	**39**

LAMPIRAN – LAMPIRAN
Formulir Sasaran, Program dan Kegiatan

Daftar Tabel

		Hal
Tabel2.1	**Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**28**
Tabel2.2	**Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**	**31**
Tabel2.3	**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**	**33**

Rencana Kinerja Tahunan

PENDAHULUAN

BAB I

BAB-I
PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Maksuddantujuan

a. Maksud

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran Tahun 2020, serta merupakan komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKT adalah :

- Sebagai dasar membuat rencana
- operasionalkegiatan.Komitmen pimpinan untuk
- menyediakan sumber daya. Digunakan untuk prosespenganggaran.
- Digunakan untuk *"service agreement"* atau komitmen kinerja ataupun *"performenceagreement"*antaralegislatifdaneksekutif.
- Digunakan untuk pemantauanprogram/kegiatan

2. DasarHukum

Penyusunan RKT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini berdasarkan pada :

a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan PemberantasanKorupsi.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011.

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah.

e. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 Perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan(RKT).

3. KeterkaitanRenstra,RKTdanLAKIP

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menyusun RKT pada setiap awal tahun anggaran. Pelaksanaan dari rencana tersebut dipertanggungjawabkan melalui LKJIP, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Sedangkan RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan, maka secara ringkas keterkaitan Renstra, Renja, dan LKJIP dapat digambarkan sebagai berikut :

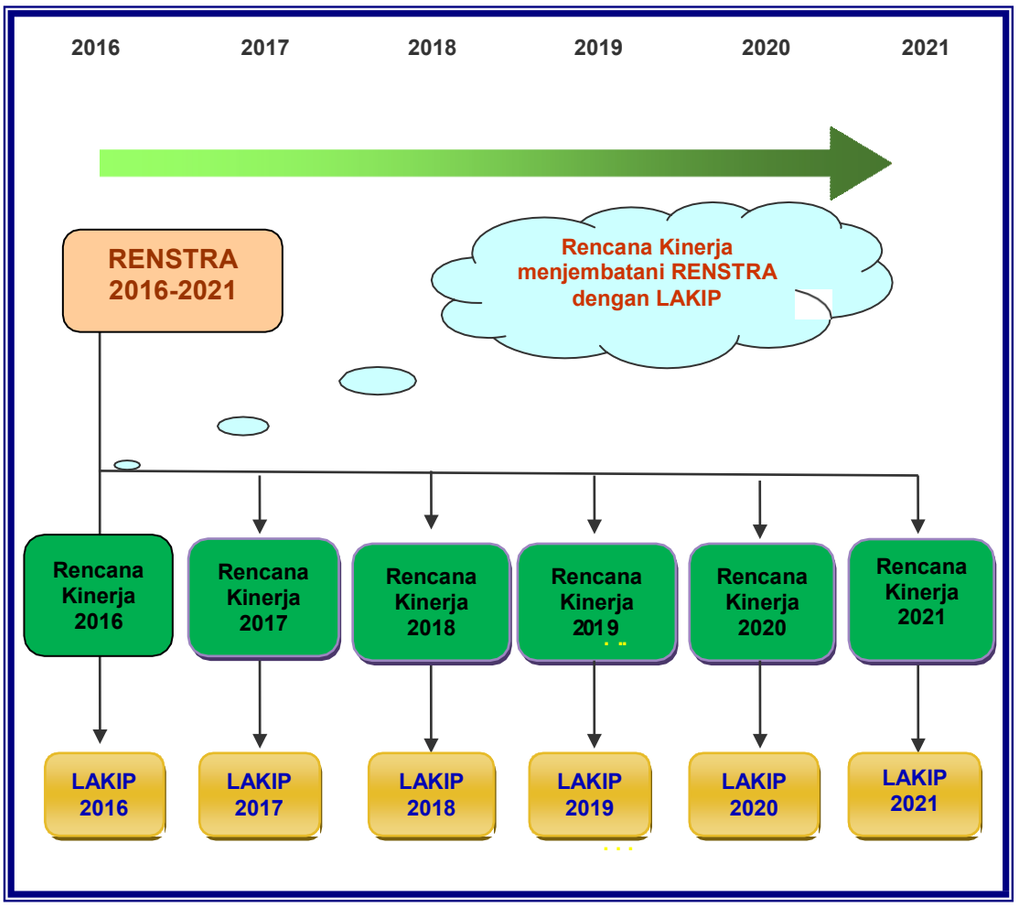

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa rencana kinerja menjembatani antara Renstra dengan LKJIP setiap tahunnya.

B. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATENSINTANG

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangkewenangannya.

2. TugasPokokdanFungsiSertaStrukturOrganisasi

a. TugasPokok

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana l berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penannggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
j. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat , efektif dan efisien;
k. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud di atas, diangkat seorang Kepala Badan.Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program penanggulangan bencana;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.

- **Sekretariat**

  Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

  a. Pengorgadinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
  b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
  c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  d. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
  f. Pengkoordinasian dalam penyusun laporan BPBD; dan
  g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

  Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra-bencana serta pemberdayaan masyarakat.

  Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsian dan dukungan logistik;
c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana;
d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari :

a. KepalaBadan

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub BagianProgram dan Keuangan;
2. Sub Bagian Aparatur dan Umum;dan
3. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:

1. Seksi Pencegahan; dan
2. Seksi Kesiapsiagaan;

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:

1. SeksiKedaruratan; dan
2. Seksi Logistik;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi; dan
2. Seksi Rekonstruksi;

f. Kelompok JabatanFungsional.

C. HAL-HAL LAIN YANGBERPENGARUH

Hal – hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia(SDM)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 21 orang yang dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1) Dari segi Kepangkatan /Golongan Ruang terdiri dari:
   a) GolonganI : -
   b) GolonganII : 7Orang
   c) GolonganIII : 15Orang
   d) GolonganIV : 2 Orang

2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal terdiri dari:
   a) S2 : 3Orang
   b) S1 : 13Orang
   c) D3 : 1Orang
   d) SLTA : 8Orang
   e) SLTP : -
   f) SD : -

3) Pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM dengan rincian sebagaiberikut:
   a) Spamen /PIMII : -Orang
   b) Spama/PIMIII : 2Orang
   c) Adum/PIMIV : 2 Orang

4) Dari segi jabatan Struktural /Eselon adalah sebagai berikut:
   a) EselonII.b : 1Orang
   b) EselonIII.a : -Orang
   c) EselonIII.b : 3Orang
   d) EselonIV.a : 9 Orang

2. Pegawai Non PNS (Tenaga kontrak) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang tenaga kontrak.

Secara keseluruhan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
1.	Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	Eselon III	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-
3.	Eselon IV	-	7	1	1	-	-	-	9	-	-
	Sub jumlah	**2**	**9**	**1**	**1**	**-**	**-**	**4**	**9**	**-**	**-**
4.	Non Eselon	1	2	-	5	-	-	-	3	5	-
	Jumlah	**3**	**11**	**2**	**6**	**-**	**-**	**4**	**12**	**5**	-

b. Sarana danPrasarana

Salah satu Sumber Daya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. GedungKantor

Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

a. Ruang Kepala Badan
b. Ruang Sekretariat, dibagi menjadi :
   a) Ruangan Sekretaris;
   b) Ruangan Kasubbag Aparatur dan Umum;
   c) Ruangan Kasubbag Perlengkapan dan Aset;

c. Ruang Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   a) Ruangan Kepala Bidang
   b) Ruangan Kepala Seksi Pencegahan
   c) Ruangan Kepala Seksi Kesiapsiagaan

d. Ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik
   a) Ruangan Kepala Bidang
   b) Ruangan Kepala Seksi Kedaruratan
   c) Ruangan Kepala Seksi Logistik

e. Ruang Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
   a) Ruangan Kepala Bidang
   b) Ruangan Kepala Seksi Rehabilitasi
   c) Ruangan Kepala Seksi Rekonstruksi

f. Gudang untuk logistik dan peralatan
g. Garasi Mobil Operasional dan Pos Jaga

2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

a.	Kendaraan RodaDua	:	13 Unit
b.	Kendaraan RodaEmpat	:	3 Unit
c.	Kandaraan Roda Enam	:	1 Unit
d.	SpeedBoat	:	3 Unit

3. Komputer

a.	KomputerPC	:	9Unit
b.	NoteBook	:	8 Unit
c.	Printer	:	28 Unit
d.	Laptop	:	19 Unit
e.	Projector	:	1 Unit
f.	Infocus	:	1 Unit

4. Meubelair, Peralatan dan Mesin Lainnya

a.	Filling Kabinet	:	4 Unit
b.	Air Conditioner	:	5 Unit
c.	Kipas Angin	:	6 Unit
d.	Mesin Fortable	:	1Unit
e.	Meja Kerja	:	4Unit
f.	Kursi Tamu	:	4Unit
g.	Kursi Rapat	:	3Unit
h.	Kursi Pejabat	:	7 Unit
i.	Televisi	:	3 Unit
j.	Generating Set	:	1 Unit
k.	Lemari Arsip Besi	:	1 Unit
l.	Lemari Arsip Kayu	:	1 Unit
m.	Kamera	:	4 Unit
n.	Mesin Tebas	:	1 Unit

Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA STRATEGIS

BAB II

BAB-II
RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS

Agar pelaksanaan tugas terarah dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibuatlah Rencana Strategis SKPD (RENSTRA- SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang periode 2016 –2021.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditegaskan dalam Pasal 111 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan PerangkatDaerah;
c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d. tujuan dansasaran;
e. strategi dan arahkebijakan;
f. rencana program dan kegiatan sertapendanaan;
g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan;dan
h. penutup

Dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan visi dan misi.Untuk itu, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah.

A. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

a. Visi

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005- 2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021"

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

1) Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasaranapendidikan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

a) Peningkatan pembangunan prasarana dan saranapendidikan;
b) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
c) Peningkatan mutu pendidikan dan tenagapendidikan.

2) Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka giziburuk.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

a) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

b) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunankesehatan

3) Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, prosentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada:

a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasardaerah;
b) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkunganhidup.

4) Religius

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemelukagama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

a) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaanmasyarakat;
b) Peningkatan toleransi antar umat beragama;dan
c) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umatberagama.

5) Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

a) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi;dan
b) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah danbesar.

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik danBersih

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggungjawab.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

a) Peningkatan kapasitas SDM aparatur;
b) Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraanpemda;
c) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah;dan
d) Reformasi birokrasi di pemerintahandaerah.

b. Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2016-2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagimasyarakat.

3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber dayadaerah.
4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupansosial.
5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.
6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahandaerahyang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik danbersih.

Dari pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 di atas, tergambar jelas peran serta dan keterlibatan langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, yang terkait erat dengan:

" **Misi 6 (enam)** yaitu Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**Tujuan** yaitu Melakukan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerahdengan **Sasaran** yaitu Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,dengan **Strategi :** Peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang penanggulangan bencana, **arah kebijakannya** adalah menyusun regulasi tentang SOP penaggulangan bencana dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait,**Indikator Kinerja**1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, **Indikator 2** Tingkat waktu tanggap(response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan **Indikator 3** Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana".

c. Penggerak Utama Pembangunan Daerah (*PrimeMover*)

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode tahun 2016-2021, dipandang perlu untuk menetapkan penggerak utama *(prime mover)* pembangunan daerah yang terdiri dari :

1) Membangun wilayah daripinggiran;
2) Penataan dan pemekaranwilayah;
3) Aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energilainnya;
4) Hilirisasiproduk;
5) Kegawatdaruratan infrastruktur transportasi;dan
6) Tata kelolapemerintahan.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipertegas lagi dalam ***prime mover 5* (lima),** yaitu **Kegawatdaruraratan infrastruktur transportasi** dan ***prime mover*6 (enam)**yaitu **Tata kelola pemerintahan** dengan sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepadamasyarakat.**

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, yaitu sebagaipenyelenggara penanggulangan bencana, maka pelayanan dasar pada masyarakat harus didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), didasari dengan semangat dan keinginan untuk menciptakan pelayanan penanggulangan bencana yang sekain berkualitas kepada masyarakat dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, optimal, bertanggung jawab untuk keselamatan masyarakat. Selain itu, aparatur kebencanaan dituntut untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral aparaturnya agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat, serta menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pelayanan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.

Tabel2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan SKPD Terhadap Percepatan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.				
No	**Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1.	**Misi 6 :** **Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih** Tujuan : Melakukan reformasi birokrasi di pemerintah daerah Sasaran : a. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemda	1.Belum optimalnya identifikasi dampak dari bencana 2. Kondisi geografis dimana tidak semua wilayah dapat dijangkau melalui jalandarat. 3. Luasnya cakupan wilayah pelayanan	1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM. 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai 3. Belum adanya Peraturan Bupati/SOP sebagai regulasi penanggulangan bencana	1. Adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana 2.Ketersediaan dana BTT untuk kondisi tanggap darurat bencana
	Indikator Kinerja : a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten b. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran c. Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			
	Program : Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana			

B. TUJUAN DANSASARAN.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakili Kepala Daerah yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan *(critical successfactors).*

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan ini dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik danidealistik.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, maka tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintangyang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

" Melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah"

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun ke depan juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misiorganisasi.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintangadalah :

" Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah "

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

C. CARA MENCAPAI TUJUAN DANSASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi.Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel T-2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun2021.**			
Misi 6 : **Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 Melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah	**Sasaran 1.1** Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Strategi 1.1** Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang penanggulangan bencana	**Kebijakan 1.1** Menyusun Regulasi tentang SOP penanggulangan bencana dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja

TAHUN 2020

BAB

III

BAB - III

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang telah menyediakan dana APBD tahun 2020 melalui DAU sebesar **Rp. 9.625.923.029,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah)** berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, untuk mendukung rencana kinerja tahun tersebut melalui **3 (tiga)**sasaran, **13 (tiga belas)** program dan **51 (lima puluh satu)** kegiatan.

A. Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun2020

Secara ringkas rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang tahun 2020 dapat dijelaskan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran

1. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana;
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar penanggulangan bencana; dan
3. Terselenggaranya pemulihan dampak bencana, dapat diukur melalui : Jumlah kajian kebutuhan pasca bencana, jumlah pemulihan fasilitas umum dan jumlah identifikasi penilaian kerusakan infrastruktur akibat bencana.

2. Program danKegiatan

Adapun program yang telah ditetapkan dalam RKA/DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan penyediaan Jasasurat-menyurat;
   b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik;
   c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
   d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
   e. Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor;
   f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan;
   g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor;
   h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan;
   i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
   j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luarDaerah;
   k. Kegiatan Penyediaan TenagaKontrak;
   l. Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) danGas; dan
   m. Kegiatan Pnenyediaan alat dan bahan kebersihan kantor;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/operasional;
   b. Kegiatan PengadaanMeubelair;
   c. Kegiatan Pengadaan Perangkat Komputer danPrinter;
   d. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanKantor;
   e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala LingkunganKantor;
   f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional;
   g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan PerlengkapanKantor;
   h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer danPrinter;

3) Program Peningkatan DisiplinAparatur
   a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas BesertaKelengkapannya;

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
   b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
   c. Pelatihan Teknis Operasi Peralatan Komunikasi;

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
   a. Kegiatan Penyusunan LAKIP;
   b. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
   c. Kegiatan PenyusunanSOP;
   d. Kegiatan PenyusunanPelaporan Keuangan Akhir Tahun;

6) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam, dengan kegiatan :
   a. Kegiatan Pendataan dan Pemutahiran Data Daerah Potensi Rawan Bencana;
   b. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;
   c. Kegiatan Pembuatan Peta Rawan Bencana
   d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam
   e. Kegiatan Posko Penanganan Banjir dan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap;
   f. Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan bagi Penduduk di tempat penampungan sementara;
   g. Kegiatan Posko Penanganan Banjir dan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap
   h. Kegiatan Kajan Kebutuhan Pasca Bencana;
   i. Kegiatan Identifikasi Penilaian Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana;
   j. Kegiatan Posko Penanganan Darurat/Tanggap Darurat;
   k. Kegiatan Apel Siaga Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla;
   l. Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan & Penyelenggaraan Penanggulangan;
   m. Kegiatan Apel Kesiagaan terpadu dan Kesiapsiagaan Nasional;
   n. Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana;

7) Program Pengendalian Kebakaran Hutan
   a. Kegiatan Pengadaan Alat Kebakaran hutan;

8) Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran
   a. Kegiatan Penetapan Level Kesiapsiagaan;

9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
   a. Kegiatan Pendirian Posko Lapangan;
   b. Kegiatan Pendirian Posko Pengendalian Karhutla;
   c. Kegiatan Simulasi Mobilisasi Berbagai Tingkatan;
   d. Kegiatan Penyebarluasan Data dan Informasi Hotspot

Untuk Point Nomor 6 huruf j sampai dengan n dan nomor 7 sampai dengan 9 merupakan kegiatan baru pada APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020yang bersumber dari anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).

10)Program Peringatan Hari Nasional danDaerah
   a. Kegiatan Pameran Pembangunan;
   b. KegiatanApel Siaga Kesiapsiagaan Terpadu & Kesiapsiagaan Nasional;

11)Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
   a. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;

12)Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan
   a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;

B. Kinerja Kegiatan Tahun2020

Kinerja kegiatan merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan program dan sasaran yang didukungnya. Untuk mengukur keberhasilan kinerja terebut, harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Adapun indikator dan target kinerja dalam mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten SintangTahun 2020, ditetapkan dengan kategori sebagai berikut :

1. Inputs(masukan)
2. Outputs(keluaran)
3. Outcomes(hasil)
4. Benefits(manfaat)
5. Impact(dampak)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, seperti: dana, sumberdaya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak dan juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Indikator impact ini menunjukan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Uraian selengkapnya indikator dan target kinerja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.

C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Tahun2020

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain :

1) Dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dankonsisten;
2) Memberi manfaat untuk mengambil keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerjaberikutnya;

3) Memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat; serta hemat, efisiensi danefektifitas.

D. Pengukuran CapaianKinerja

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{CapaianIndikator} \quad \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana-(Realisasi-}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{(2 x Rencana)-}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menggunakan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi *ultimate outcomes* serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya secara optimal sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapatdisajikan.

Untuk mengetahui tingkat capaian kerja, pengukuran kinerja tahun 2019 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat percapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan(PKK)
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran Pencapaian Sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran(PPS).

Khusus untuk pencapaian kinerja tingkat sasaran akan disimpulkan dengan menggunakan skala ordinal dengan kategori sebagai berikut:

85 s/d100	**Sangat berhasil**
70≤x<85	**Berhasil**
55≤x<70	**Cukup Berhasil**
X<55	**Tidak Berhasil**

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan " **Metode Rata-Rata Data Kelompok**" dengan rumus:

$$\textbf{Capaian Sasaran} = \frac{\textbf{Σ(Jumlah indikator kategori yang sama x Nilai Mean kategori)}}{\textbf{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal, yaitu :

a. sangat berhasil (nilai tengah92,5%);
b. berhasil (nilai tengah77,5%);
c. cukup berhasil (nilai tengah 62,5%);dan
d. tidak berhasil (nilai tengah27,5%).

Nilai akhir capaian (%) sasaran yaitu jumlah dari hasil perkalian jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil*** *dan* ***tidak berhasil.***

Rencana Kinerja Tahunan

PENUTUP

BAB IV

BAB-IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021, dan diharapkan mampu memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah KabupatenSintang.

Pada tahun 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 9.625.923.029,00 yang terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung Rp.1.349.816.479,00

b. Belanja Langsung Rp.8.276.106.550,00

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020, anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung rencana kinerja yang dilaksanakan melalui 12 (dua belas) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan.

Selanjutnya RKT dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yangterjadi.

B. UpayaYangAkanDilakukan

Mengingat RKT 2020 merupakan komitmen kinerja, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain sebagai berikut :

1) RKT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020*wajib* dijadikan acuan bagi seluruh unsur pelaksana tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian danpelaporan.
2) Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang harus senantiasa meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 lebih baik dari tahunsebelumnya.
3) Peningkatan dan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yangberlaku.

@@@@@

USULAN KEGIATAN BARU
REVISI RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	1.Mapping Aset Dana Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi Tahun 2017	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Non Alam	1. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19	–
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	1. Sosialisasi dan/atau penyuluhan karhutla melalui berbagai ragam metode 2. Patroli Pencegahan Pengendalian Karhutla 3.Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Karhutla	

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		NO.	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan bencana Kabupaten	14 Kecamatan	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Output : Jumlah monitoring dan informasi potensi bencana alam yang disampaikan kepada masyarakat Outcome : Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Rupiah	101.370.000,00	
			14 Kecamatan		2	Kegiatan Pendataan dan pemetaan daerah potensi rawan bencana	Output : Jumlah data untuk pemetaan daerah potensi rawan bencana Outcome : tersedianya data untuk pemetaan daerah potensi rawan bencana	Rupiah	89.233.000,00	
			14 Kecamatan		3	Kegiatan Pembuatan Peta Rawan Bencana	Output : Jumlah peta rawan bencana yang di buat Outcome : tersedianya data untuk pemetaan daerah potensi rawan bencana	Rupiah	20.045.500,00	

			100%		4	Kegiatan apel siaga pencegahan dan penanggulangan karhutla	Output : Jumlah peserta yang mengikuti apel Outcome : terselenggaranya apel siaga untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan karhutla	Rupiah	41.924.100,00	
			14 Kecamatan		5	Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Penanggulangan	Output : Jumlah perencanaan dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan Outcome : meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rupiah	315.081.700,00	
			14 Kecamatan		6	Kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Output : Jumlah sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dilaksanakan Outcome : meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rupiah	50.000.000,00	
			14 Kecamatan	**Program Peningkatan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran**	7	Kegiatan Penetapan level kesiapsiagaan	Output : Jumlah level kesiapsiagaan yang ditetapkan Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Rupiah	124.139.000,00	
			14 Kecamatan	**Program Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan**	8	Kegiatan pendirian posko lapangan	Output : Jumlah posko lapangan yang didirikan	Rupiah	745.659.000,00	

			14 Kecamatan		9	Kegiatan pendirian posko pengendalian karhutla	Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana bersama pihak terkait Output : Jumlah posko pengendalian karhutla yang didirikan Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana karhutla	Rupiah	217.715.650,00	
			14 Kecamatan		10	Kegiatan simulasi mobilisasi berbagai tingkatan	Output : Jumlah simulasi mobilisasi di berbagai tingkatan Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana	Rupiah	249.998.000,00	
			14 Kecamatan		11	Kegiatan penyebarluasan data dan informasi hotspot	Output : Jumlah data hotspot yang disampaikan kepada masyarakat Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana karhutla	Rupiah	471.650.000,00	
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana	35 bencana	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	12	Kegiatan pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Output : Jumlah logistik yang tersedia untuk membantu korban dampak bencana Outcome : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban dampak bencana	Rupiah	95.550.000,00	

			35 bencana		13	Kegiatan posko penanganan banjir dan karhutla serta kabut asap	Output : Jumlah posko penanganan banjir dan karhutla yang disiapkan Outcome : Meningkatnya penanganan banjir dan karhutla	Rupiah	216.835.000,00	
			35 bencana		14	Kegiatan posko penanganan darurat/tanggap darurat bencana	Output : Jumlah posko penanganan darurat/tanggap darurat bencana disiapkan Outcome : Meningkatnya penanganan darurat/tanggap darurat bencana	Rupiah	891.330.010,00	
			35 bencana	**Program Pengendalian kebakaran hutan**	15	Kegiatan Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan	Output : Jumlah alat pemadam kebaran hutan yang diadakan Outcome : Tersedianya alat pemadam kebakaran hutan	Rupiah	69.675.000,00	
		Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	20 bencana	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	16	Kegiatan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PB)	Output : Jumlah dokumen kajian kebutuhan pasca bencana yang tersedia Outcome : Meningkatnya penanganan pasca bencana untuk pemulihan korban dampak bencana	Rupiah	45.107.000,00	
			20 bencana		17	Kegiatan Identifikasi Penilaian kerusakan infrastruktur akibat bencana	Output : Jumlah bencana yang diidentifikasi penilaian kerusakan Outcome : tersedianya data dampak dari bencana	Rupiah	100.675.500,00	

			20 bencana	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	18	Kegiatan pembangunan drainase/gorong-gorong	Output : Jumlah drainase/gorong-gorong yang dibangun Outcome : Normalnya kembali kehidupan masyarakat yang terdampak bencana banjir akibat kerusakan drainase/gorong-gorong	Rupiah	150.321.950,00	
			20 bencana	**Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	19	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Output : Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara Outcome : Berfungsinya kembali jembatan yang rusak akibat dari bencana banjir	Rupiah	1.960.219.400,00	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Jumlah pelayanan administrasi perkantoran**	**Jumlah pelayanan administrasi perkantoran**	Persen	100	
					20	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah materai yang dibutuhkan Outcome : Tersedianya materai	Rupiah	3.000.000,00	
					21	Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Jumlah pemakaian listrik, telpon dan internet kantor Outcome : Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	Rupiah	51.900.000,00	

					22	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Outcome : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rupiah	20.793.000,00	
					23	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Jumlah buku cek Outcome : Tersedianya buku cek	Rupiah	459.000,00	
					24	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Output : Jumlah ATK dan alat komputer lainnya Outcome : Tersedianya ATK dan alat komputer lainnya	Rupiah	59.941.000,00	
					25	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rupiah	19.562.250,00	
					26	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah alat listrik kantor Outcome : Tersedianya alat listrik kantor	Rupiah	17.254.900,00	
					27	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Output : Jumlah makanan dan minuman rapat Outcome : Tersedianya makanan dan minuman rapat	Rupiah	24.035.000,00	
					28	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rupiah	368.875.000,00	

					29	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output : Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Rupiah	158.945.000,00	
					30	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	Output : Jumlah tenaga kontrak Outcome : Tersedianya jasa tenaga kontrak	Rupiah	459.495.000,00	
					31	Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Output : Jumlah BBM yang digunakan Outcome : Tersedianya BBM untuk keperluan dinas	Rupiah	31.350.000,00	
					32	Kegiatan Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	Output : Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor Outcome : Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	Rupiah	9.001.050,00	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Jumlah Sumber Daya Manusia /Aparatur yang mengikuti pelatihan	Persen	100	
					33	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Outcome : Meningkatnya kemampuan PNS dalam menunjang menyelesaikan tugas dan fungsinya	Rupiah	165.735.000,00	

					34	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah peraturan oerundang-undanagan yang disosialisasikan Outcome : Meningkatnya kemampuan peserta sosialisasi dalam menyelesaikan urusan kebencanaan	Rupiah	57.108.000,00	
					35	Kegiatan Pelatihan Teknis Operasi Peralatan Komunikasi	Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Outcome : Meningkatnya kemampuan peserta pelatihan dalam mengoperasikan peralatan komunikasi	Rupiah	39.140.250,00	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional dinas	Persen	100	
					36	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/ operasioanal	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk menunjang kegiatan operasional kantor	Rupiah	186.780.000,00	
					37	Kegiatan Pengadaan mebeleur	Output : Jumlah mebeleur yang diadakan Outcome : Tersedianya mebeleur yang dibutuhkan untuk menunjang aparatur dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya	Rupiah	46.415.000,00	

					38	Kegiatan Pengadaan perangkat komputer dan printer	Output : Jumlah perangkat komputer, laptop dan printer yang diadakan Outcome : Tersedianya perangkat komputer, laptop dan printer yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran	Rupiah	138.117.040,00	
					39	Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan operasional kantor	Rupiah	51.550.000,00	
					40	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk menunjang kegiatan operasional kantor	Rupiah	97.350.000,00	
					41	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kegiatan operasional kantor	Rupiah	8.250.000,00	

					42	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	Output : Jumlah perangkat komputer dan printer yang dipelihara Outcome : Terpeliharanya perangkat komputer dan printer untuk menunjang kegiatan operasional kantor	Rupiah	18.550.000,00	
					43	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor	Output : Jumlah lingkungan kantor yang dipelihara Outcome : Terpeliharanya lingkungan kantor	Rupiah	44.307.400,00	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Jumlah pakaian dinas dan pakaian olahraga yang disediakan	Persen	100	
				Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya di sediakan Outcome : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk menunjang kegiatan operasional kantor	Rupiah	45.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Laporan yang disusun	Persen	100	
					45	Kegiatan Penyusunan LAKIP	Output : Jumlah dokumen laporan yang disusun	Rupiah	3.711.250,00	

							Outcome : Tersusunnya laporan LAKIP			
					46	Kegiatan Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	Output : Jumlah dokumen Renstra, Renja dan RKA yang disusun Outcome : Tersusunnya Renstra, Renja dan RKA OPD	Rupiah	3.741.250,00	
					47	Kegiatan Penyusunan SOP	Output : Jumlah dokumen SOP yang disusun Outcome : Tersusunnya SOP untuk menunjang dalam penanganan bencana	Rupiah	66.079.250,00	
					48	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Output : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun Outcome : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Rupiah	3.957.000,00	
						Jumlah			**8.276.106.550,00**	

Sintang, Pebruari 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG

Ir. BERNHAD SARAGIH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19650201 199003 1 009

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK TABEL RKT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(5)	
Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan bencana Kabupaten	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	
			1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
			2	Kegiatan Pendataan dan pemetaan daerah potensi rawan bencana
			3	Kegiatan Pembuatan Peta Rawan Bencana
			4	Kegiatan Identifikasi Penilaian kerusakan infrastruktur akibat bencana
			5	Kegiatan apel siaga pencegahan dan penanggulangan karhutla
			6	Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Penanggulangan
			7	Kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
			Program Peningkatan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran	
			1	Kegiatan Penetapan level kesiapsiagaan
			Program Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	
			1	Kegiatan pendirian posko lapangan
			2	Kegiatan pendirian posko pengendalian karhutla
			3	Kegiatan simulasi mobilisasi berbagai tingkatan
			4	Kegiatan penyebarluasan data dan informasi hotspot

		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	
			1.	Kegiatan pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
			2.	Kegiatan posko penanganan banjir dan karhutla serta kabut asap
			3.	Kegiatan posko penanganan darurat/tanggap darurat bencana
			Program Pengendalian kebakaran hutan	
			1	Kegiatan Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
		Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	
			1.	Kegiatan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PB)
			Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
			1.	Kegiatan pembangunan drainase/gorong-gorong
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
			1.	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2	Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
			3	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
			4	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
			5	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
			6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			7	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			8	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

			9	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
			10	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
			11	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
			12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
			13.	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
			2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			3	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			1	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/ operasioanal
			2	Kegiatan Pengadaan mebeleur
			3	Kegiatan Pengadaan perangkat komputer dan printer
			4	Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
			5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			6	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
			7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer
			8	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
			1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
			1	Kegiatan Penyusunan LAKIP
			2	Kegiatan Penyusunan rencana kerja perangkat daerah
			3	Kegiatan Penyusunan SOP
			4	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

TABEL 2.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
SKPD TAHUN 2016 - 2021

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada tahun ke -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan bencana Kabupaten	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana	20 bencana	20 bencana	25 bencana	30 bencana	35 bencana	40 bencana
			Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	10 bencana	10 bencana	12 bencana	15 bencana	20 bencana	20 bencana

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		NO.	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan bencana Kabupaten	14 Kecamatan	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana non alam**	1	Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19	Output : Jumlah monitoring dan informasi potensi bencana alam yang disampaikan kepada masyarakat Outcome : Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Rupiah	1.110.341.100,00	
			14 Kecamatan	**Program Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan**	2	Kegiatan simulasi mobilisasi berbagai tingkatan	Output : Jumlah simulasi mobilisasi di berbagai tingkatan Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana	Rupiah	249.998.000,00	
			14 Kecamatan		3	Kegiatan penyebarluasan data dan informasi hotspot	Output : Jumlah data hotspot yang disampaikan kepada masyarakat Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana karhutla	Rupiah	312.550.000,00	

			14 Kecamatan		4	Kegiatan Sosialisasi dan/atau penyuluhan Karhutla melalui berbagai ragam metode	Output : Jumlah peserta sosialisasi dan/atau penyuluhan karhutla Outcome : Meningkatnya pengetahuan tentang kesiapsiagaan dan pencegahan bencana karhutla	Rupiah	296.719.000,00		
			14 Kecamatan		5	Kegiatan Patroli Pencegahan Pengendalian Karhutla	Output : Jumlah wilayah karhutla yang di monitoring Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana karhutla	Rupiah	394.035.000,00		
			14 Kecamatan		6	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Karhutla	Output : Jumlah sarana prasarana pencegahan pengendalian karhutla Outcome : Meningkatnya pengetahuan tentang kesiapsiagaan dan pencegahan bencana karhutla	Rupiah	666.736.350,00		
			14 Kecamatan	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	7	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Output : Jumlah monitoring dan informasi potensi bencana alam yang disampaikan kepada masyarakat Outcome : Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Rupiah	80.590.000,00		

			14 Kecamatan		8	Pendataan dan Pemetaan Daerah Potensi Rawan Bencana	Output : Jumlah data untuk pemetaan daerah potensi rawan bencana Outcome : tersedianya data untuk pemetaan daerah potensi rawan bencana	Rupiah	89.233.000,00	
			250 orang		9.	Apel siaga pencegahan dan penanggulangan karhutla	Output : Jumlah peserta apel siaga pencegahan dan penanggulangan karhutla Outcome : Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Rupiah	24.539.100,00	
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana	35 bencana	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	10	Kegiatan posko penanganan banjir dan karhutla serta kabut asap	Output : Jumlah posko penanganan banjir dan karhutla yang disiapkan Outcome : Meningkatnya penanganan banjir dan karhutla	Rupiah	172.835.000,00	
			'35 bencana		11	Posko Penanganan darurat/tanggap darurat bencana	Output : Jumlah posko penanganan darurat/tanggap darurat bencana Outcome : Meningkatnya pelayanan penanggulangan saat bencana	Rupiah	400.000.000,00	
			'35 bencana		12	Kegiatan pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Output : Jumlah logistik yang tersedia untuk membantu korban dampak bencana	Rupiah	95.550.000,00	

			'35 bencana	**Program Pengendalian kebakaran hutan**	13	Kegiatan Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan	Outcome : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban dampak bencana Output : Jumlah alat pemadam kebaran hutan yang diadakan Outcome : Tersedianya alat pemadam kebakaran hutan	Rupiah	64.000.000,00	
		Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	20 bencana	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	14	Identifikasi Penilaian Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana	Output : Jumlah bencana yang diidentifikasi penilaian kerusakan Outcome : tersedianya data dampak dari bencana	Rupiah	85.025.500,00	
			20 bencana		15	Mapping Aset Dana Hibah Rehabilitasi / Rekontruksi Tahun 2017	Output : Jumlah aset dana hibah rehabilitasi/rekonstruksi tahun 17 yang di mapping Outcome : tersedianya data dampak dari bencana	Rupiah	67.000.000,00	
			20 bencana	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	16	Kegiatan pembangunan drainase/gorong-gorong	Output : Jumlah drainase/gorong-gorong yang dibangun Outcome : Normalnya kembali kehidupan masyarakat yang terdampak bencana banjir akibat kerusakan drainase/gorong-gorong	Rupiah	150.321.950,00	

			20 bencana	**Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	17	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Output : Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara Outcome : Berfungsinya kembali jembatan yang rusak akibat dari bencana banjir	Rupiah	605.509.375,00	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	
					18	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah materai yang dibutuhkan Outcome : Tersedianya materai	Rupiah	3.000.000,00	
					19	Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Jumlah pemakaian listrik, telpon dan internet kantor Outcome : Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	Rupiah	52.960.000,00	
					20	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Outcome : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rupiah	14.593.000,00	
					21	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Jumlah buku cek Outcome : Tersedianya buku cek	Rupiah	459.000,00	
					22	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Output : Jumlah ATK dan alat komputer lainnya Outcome : Tersedianya ATK dan alat komputer lainnya	Rupiah	69.866.000,00	

					23	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rupiah	19.562.250,00		
					24	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah alat listrik kantor Outcome : Tersedianya alat listrik kantor	Rupiah	9.399.900,00		
					25	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Output : Jumlah makanan dan minuman rapat Outcome : Tersedianya makanan dan minuman rapat	Rupiah	39.660.900,00		
					26	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rupiah	203.315.000,00		
					27	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Rupiah	187.574.100,00		
					28	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	Output : Jumlah tenaga kontrak Outcome : Tersedianya jasa tenaga kontrak	Rupiah	459.495.000,00		

					29	Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Output : Jumlah BBM yang digunakan Outcome : Tersedianya BBM untuk keperluan dinas	Rupiah	20.900.000,00	
					30	Kegiatan Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	Output : Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor Outcome : Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	Rupiah	7.001.050,00	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional dinas	Persen	100	
					32	Kegiatan Pengadaan mebeleur	Output : Jumlah mebeleur yang diadakan Outcome : Tersedianya mebeleur yang dibutuhkan untuk menunjang aparatur dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya	Rupiah	46.415.000,00	334.732.040,00
					33	Kegiatan Pengadaan perangkat komputer dan printer	Output : Jumlah perangkat komputer, laptop dan printer yang diadakan Outcome : Tersedianya perangkat komputer, laptop dan printer yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran	Rupiah	138.117.040,00	
					34	Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Rupiah	47.050.000,00	

							Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan operasional kantor			
					35	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk menunjang kegiatan operasional kantor	Rupiah	76.350.000,00	
					36	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kegiatan operasional kantor	Rupiah	8.250.000,00	
					37	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	Output : Jumlah perangkat komputer dan printer yang dipelihara Outcome : Terpeliharanya perangkat komputer dan printer untuk menunjang kegiatan operasional kantor	Rupiah	18.550.000,00	

				Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Jumlah pakaian dinas dan pakaian olahraga yang disediakan			
					39	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya di sediakan Outcome : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk menunjang kegiatan operasional kantor	Rupiah	45.000.000,00	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Jumlah Dokumen Laporan yang disusun	Persen	100	
					40	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Outcome : Meningkatnya kemampuan PNS dalam menunjang menyelesaikan tugas dan fungsinya	Rupiah	-	
					41	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah peraturan oerundang-undanagan yang disosialisasikan Outcome : Meningkatnya kemampuan peserta sosialisasi dalam menyelesaikan urusan kebencanaan	Rupiah	-	

				Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Jumlah Dokumen Laporan yang disusun	Persen	100	
					42	Kegiatan Penyusunan LAKIP	Output : Jumlah dokumen laporan yang disusun Outcome : Tersusunnya laporan LAKIP	Rupiah	3.711.250,00	**16.868.750,00**
					43	Kegiatan Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	Output : Jumlah dokumen Renstra, Renja dan RKA yang disusun Outcome : Tersusunnya Renstra, Renja dan RKA OPD	Rupiah	3.741.250,00	
					44	Kegiatan Penyusunan SOP	Output : Jumlah dokumen SOP yang disusun Outcome : Tersusunnya SOP untuk menunjang dalam penanganan bencana	Rupiah	5.459.250,00	
					45	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Output : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun Outcome : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Rupiah	3.957.000,00	
J U M L A H									**6.349.370.365,00**	

Sintang, Nopember 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG

Ir. BERNHAD SARAGIH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19650201 199003 1 009